

# KONSISTENSI VISI KEPALA DAERAH DENGAN APBD DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI JAWA TENGAH

*Warsito*

## **Abstract**

*Regional head vision is the ideals to be achieved in five years in the form of the local medium term development plan (RPJMD). The vision must be able to be implemented in the local revenue and expenditure budget (APBD) either in the programs or activities with the support of sufficient funding. This research aims to understand the consistency of the vision and the budget through qualitative method. The results showed that the vision has been consistent with APBD. However, the consistency was not followed by appropriate budget allocations. The height budget allocation for personnel expenditures and bureaucratic routines become one of the causes.*

*Keywords: Vision, APBD, Expenditure*

## **A. PENDAHULUAN**

Perencanaan pembangunan merupakan faktor penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan menjadi salah satu bentuk perencanaan kebijakan dimana merupakan proses untuk menentukan dan mengatur persoalan-persoalan publik dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Dalam sistem desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah, sebagaimana dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah perencanaan dan pengendalian pembangunan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom baik kabupaten/kota maupun provinsi.

Kemudian idealnya visi misi kepaladaerah terpilih memiliki konsistensi dengan RPJPD, RPJMD dan APBD yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah pada setiap tahunnya. Konsistensi visi kepala daerah dengan APBD menjadi sangat penting mengingat APBD memiliki enam maka penting, pertama, otoriasi. Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran bersangkutan. Kedua, perencanaan. APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Ketiga, pengawasan. APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan. Keempat, alokasi. Anggaran daerah harus dapat diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja /mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Kelima, distribusi. Kebijakan anggaran daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Keenam, stabilisasi. APBD menjadi alat ukur untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kemampuan kepala daerah dalam menjabarkan visi misi kedalam program dan kegiatan dalam APBD merupakan faktor penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan di daerah termasuk didalamnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebaik apapun visi misi kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak akan berjalan efektif tanpa disertai dengan kemampuan menjabarkan program dan kegiatan dalam APBD.

Demikian halnya visi misi kepala daerah memerlukan konsistensi penjabaran dalam APBD. Kepala daerah terpilih yang memiliki visi baru dengan kepala daerah sebelumnya idealnya harus mampu menterjemahkan dalam program dan kegiatan dalam APBD yang baru pula sesuai dengan visi misi kepala daerah tersebut. Sehingga prgram dan kegiatan pemerintah daerah memiliki inovasi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat melalui

APBD sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih.

Program dan kegiatan dalam APBD harusnya merupakan program dan kegiatan yang sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih, tidak semata merupakan program dan kegiatan yang didesain oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga apa yang menjadi visi misi kepala daerah selama lima tahun dapat tercapai dengan pentahapan melalui APBD tidak semata rutinitas program dan kegiatan yang dijalankan oleh SKPD.

Dengan kondisi tersebut tentunya memerlukan kemampuan dan konsistensi kepala daerah dalam menterjemahkan visi misinya kedalam program dan kegiatan

## **B. PEMBAHASAN**

Visi kepala daerah dalam mensejahterakan rakyat mutlak memerlukan kemampuan menterjemahkan visi tersebut dalam APBD. Sebaik apapun visi yang disusun, tanpa dibarengi dengan pejabaran dalam APBD maka visi tersebut mustahil akan terwujud.

### **B.1. Kabupaten Pekalongan**

Infrastruktur merupakan prioritas pembangunan yang diambil oleh Kepala Daerah (H. Amat Antono). Kondisi tersebut berangkat dari kondisi infrastruktur di Kabupaten Pekalongan khususnya jalan raya yang mengalami rusak atau rusak berat. Melalui pembangunan infrastruktur diharapkan perekonomian masyarakat dapat meningkat. Program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pekalongan diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dimana pada tahun 2012 dilaksanakan dalam 15 program diantaranya pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan saluran drainase, pembangunan talud, rehabilitasi jalan dan jembatan.

Pendidikan merupakan prioritas pembangunan kedua yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2012. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam 12 program yakni Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar 9 Tahun, Program Pendidikan Menengah.

dalam APBD sehingga mampu memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing pembangunan manusia dengan daerah lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara sebagai metode pengambilan data primer yang berfokus pada apakah visi kepala daerah konsisten dengan APBD bagi peningkatan kesejahteraan rakyat?. Apakah visi kepala daerah telah tercermin dalam program, kegiatan dalam APBD?. Apakah alokasi anggaran untuk program dan kegiatan sudah ideal?. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kendal, Kab Pekalongan, dan Kota Salatiga.

Kegiatan penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dianggarkan senilai Rp 2,9 miliar. Kegiatan tersebut merupakan upaya dari Pemerintah Daerah untuk memberikan kesempatan bagi siswa dari keluarga tidak mampu untuk bisa melanjutkan belajar pada jenjang SMA/ sederajat, sehingga diharapkan dengan adanya beasiswa tersebut rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pekalongan dapat meningkat.

Pemerintah Daerah juga telah mengupayakan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui program peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Program tersebut terdiri dari 6 kegiatan dimana salah satu kegiatannya adalah pelaksanaan sertifikasi pendidikan dan penilaian terhadap kinerja kepala sekolah. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin senilai Rp 2 miliar merupakan program yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Pekalongan. Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan Kegiatan Pendampingan Pelayanan kesehatan Maskin di RS Pemerintah, Puskesmas dan Puskesmas Perawatan.

Pengembangan ekonomi kecil dan menengah memerlukan program dan kegiatan yang tepat melalui APBD. Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah menyelenggarakan 9 program untuk

pengembangan UMKM diantaranya; Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional. Alokasi anggaran tersebut terlalu kecil jika melihat kondisi sektor usaha kecil dan mikro menengah di Kabupaten Pekalongan. Sebagai gambaran dalam program peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional dengan alokasi anggaran senilai Rp 250 juta tidak sebanding dengan jumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Jumlah Pasar Tradisional di Kabupaten Pekalongan yang berada di tingkat kecamatan sejumlah 10 pasar tradisional, sedangkan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Pekalongan sejumlah 272 dimana masing-masing desa memiliki pasar kecil yang menjadi lokasi jual beli masyarakat setempat.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dijabarkan dalam sejumlah kegiatan diantaranya adalah Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pekalongan.

Namun demikian berbagai program dan kegiatan tersebut belum didukung oleh alokasi anggaran yang mencukupi, semisal program pengadaan pestisida senilai Rp 100 juta. Padahal keberadaan pestisida sangat diperlukan oleh petani dalam upaya pemberantasan hama. Demikian halnya dengan kegiatan sarana dan prasarana pengelolaan air yang dianggarkan senilai Rp 180 juta, padahal kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air di Kabupaten Pekalongan memiliki jumlah yang sangat banyak dan cakupan yang sangat luas.

## **B.2. Kabupaten Kendal**

Dalam Penyelenggaraan urusan pendidikan, pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melaksanakan enam program yakni: Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kerja Non Kependidikan. Pada masing-masing program kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan. Pada tahun 2011 dana

APBD lebih banyak digunakan untuk memacu prestasi siswa melalui kegiatan-kegiatan baik yang bersifat kompetitif maupun pelatihan-pelatihan. Sebagai gambaran pada Program Wajar 9 Tahun diadakan lomba-lomba untuk siswa SD dan SMP demikian halnya pada program pendidikan menengah.

Dalam penyelenggaraan urusan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Suwondo dilakukan 11 program yang langsung berkaitan dengan masyarakat diantaranya adalah Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kendal dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Pada tahun 2011 diselenggarakan 11 program yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur yakni: Program Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pengendalian Banjir, Program Instalasi Pembangkit Listrik.

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kab Kendal yang diusung oleh Bupati terlebih ketika bupati merupakan sosok perempuan. Pemberdayaan perempuan di Kab Kendal dihadapkan pada sejumlah permasalahan diantaranya adalah kekerasan perempuan dan anak. Pemberdayaan perempuan di Kab Kendal dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dimana pada tahun 2011 diselenggarakan 5 program yakni Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender, dan Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga.

## **B.3. Kota Salatiga**

Dalam penyelenggaraan urusan pendidikan Pemerintah Kota Salatiga melakukan 12 program yang berkaitan langsung dengan masyarakat yakni program Pendidikan Anak Usia Dini, Wajar

9 Tahun, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal.

Dari program dan kegiatan di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga telah menyelenggarakan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan di Kota Salatiga. Termasuk didalamnya memberikan akses yang lebih pada masyarakat miskin untuk mengenyang bangku pendidikan menengah melalui Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dengan nilai Rp 199.000.000,00 dan Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dengan alokasi anggaran Rp 25.000.000,00.

Urusan kesehatan diselenggarakan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dimana dalam Dinas Kesehatan menyelenggarakan 15 program yang berkaitan langsung dengan masyarakat diantaranya adalah: Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Perbaikan Gizi Masyarakat, dan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

Sebagai wilayah perkotaan dengan luas wilayah yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah, kondisi infrastruktur di Salatiga relatif jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten di Jawa Tengah. Namun demikian kepala daerah tetap berupaya untuk membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Program yang dilaksanakan untuk urusan pekerjaan umum di Kota Salatiga berjumlah 6 program diantaranya adalah pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp 12,8 miliar, program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan senilai Rp 20,3 miliar.

Salah satu persolan dalam kesejahteraan rakyat adalah dalam urusan sosial dimana Pemerintah Daerah mencoba menyelesaikan permasalahan dalam urusan sosial diantaranya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terdiri dari anak terlantar, penyandang cacat, maupun fakir miskin. Dalam urusan sosial diampu oleh SKPD Dinas Sosial Ketenagakerajaan dan Transmigrasi,

## C. PENUTUP

### C.1. Kesimpulan

Kepala daerah di Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, dan Kabupaten

Pemkot Salatiga melaksanakan 6 program yang terkait langsung yakni program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan PMKS Lainnya, Pembinaan Anak Terlantar, dan Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo.

Penyelenggaraan urusan UMKM di Kota Salatiga dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM dimana pada tahun 2012 dilaksanakan dalam 13 program diantaranya adalah Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Berdasarkan data tentang program dan kegiatan dalam urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, dan UMKM peneliti mengambil kesimpulan bahwa program dan kegiatan yang telah disusun sangatlah baik dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian dari sudut pandang besarnya alokasi anggaran dari masing-masing program tersebut nampaknya belum ideal. Dalam program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan hanya dianggarkan sebesar Rp 120 juta. Sementara jumlah PKL dan asongan di Kota Salatiga jumlahnya sangat banyak. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dialokasikan sebesar Rp. 39,500,000.

Jika kita bandingkan dengan program untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat rutin tetapi tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat maka jumlah tersebut menjadi tidak ideal. Belanja untuk Program Administrasi Perkantoran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mencapai Rp 1,32 miliar. Kondisi yang sama juga terjadi pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, maupun sosial.

Pekalongan telah memiliki visi yang baik dalam upaya mensejahterakan rakyat didaerahnya dengan menitikberatkan pada

pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, usaha mikro kecil dan menengah. Visi tersebut juga telah diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam APBD di tahun pertama menjabat. Program dan kegiatan yang disusun dalam APBD telah konsisten dengan visi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penjabaran visi kepala daerah dalam APBD memerlukan konsistensi dalam penganggaran. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, usaha mikro kecil dan menengah, dan sosial belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan belanja untuk program rutin penyelenggaraan pemerintahan seperti program pelayanan administrasi perkantoran serta program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, A dan Yuwono. Y. 2002. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: JIP UNDIP.
- Brannen, Julia. 1997. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eriyanto. 2007. *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LKIS.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusamedia.
- Lexi J Moelong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nugroho, Rian. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Patton, M Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinambela, Mahadi dan Azhari S. 2003. *Dilema Otonomi daerah dan Masa Depan Nasionalisme Indonesia*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Syaukani dkk. 2005. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hessel. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MedPress.

Tinggnya belanja pegawai juga menjadikan alokasi belanja daerah untuk program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin berkurang.

#### C.2. SARAN

1. Kepala Daerah harus konsisten mempertahankan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk program-program khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, usaha mikro kecil dan menengah, dan sosial.
2. Kepala Daerah perlu mengurangi alokasi belanja pada pos belanja tidak langsung khususnya pada belanja program pelayanan administrasi perkantoran serta program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Kepala Daerah perlu mengurangi persentase alokasi belanja pegawai dengan melakukan pemetaan dan restrukturisasi birokrasi di daerah secara berkesinambungan.